

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dewi Wulansari, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Haar, Teer, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1994, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Halim, Ridwan, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamid, AT, 1980, *Cara-Cara Berperkara & Praktek Peradilan*, Dana Kesejahteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang
- Harahap, M Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hartanto, J Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Lasbang Mediatama, Yogyakarta
- Hiariej, Eddy OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta

- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mutaqien, Dadan, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta
- Murjiyanto, R dan Wibawanti, Sri Erna, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Parangin, Effendi, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Purnamasari, Irma Devita, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Mizan Pustaka, Bandung
- Pide, Suriyaman Masturi, 2014, *Hukum Adat; Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Sahat, Sinaga, Sahat, 2007, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bandung
- Sarjita dan Nata Menggala, Hasan Basri, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, 1986, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya

Soeroso, 2006, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta

Subana, M dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, CV Pustaka Setia, Bandung

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Sudiyat, Iman, 1985, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) : *Staatsblad* 23/1847

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl

C. Lain – lain

Arum, Elok Puspa, 2016, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya, *Tesis*, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta

Yulianti, Miming, 2013, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.Bjm) Tanggal 28 Maret 1997, *Tesis*, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta

Agus Santoso, Deni, 2016, Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Lusiana, 2013, Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Lestari, Dwi, 2014, Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Kota Yogyakarta, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

D. Wawancara

Boyke Napitupulu, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Indramayu, *Wawancara*, 27 April

Hitaprana, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Sleman, *Wawancara* 13 April

Intan Tri, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Malang, *Wawancara*, 20 April

Miyono, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Sleman, *Wawancara* 6 April

- Misbach Ali, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Yogyakarta, *Wawancara*, 11 April
- Mustofa, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Kota Yogyakarta, *Wawancara*, 12 Juni
- Sumendro, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Sleman, *Wawancara*, 13 April
- S, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Bantul, *Wawancara*, 2 Mei
- Titik Budi, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Btl), Yogyakarta, *Wawancara*, 2 Mei